

## Model Pemberdayaan Desa Berkelanjutan Dalam Perspektif Feminis

Siti Zakiah<sup>1</sup>, Eva Mardiyana<sup>2</sup> & Akhmad Niko Apriadi<sup>3</sup>

Telkom University<sup>1</sup>, Telkom University<sup>2</sup>, STIA Bagasasi<sup>3</sup>

\*Corresponding author, e-mail: [sitizakiah@tass.telkomuniversity.ac.id](mailto:sitizakiah@tass.telkomuniversity.ac.id)

### ARTICLE INFO

Received 18 Juli 2024

Accepted 11 Oktober 2024

Published 14 Oktober 2024

**Keywords:** sustainable village tourism, patriarchal cultures, Empowerment Based Tourism (EBT), Gender, Ekistensialisme.

**DOI:**

<http://dx.doi.org/10.24036/jmpe.v7i3.16278>

### ABSTRACT

In patriarchal cultures, women often face constraints in participation and empowerment in the tourism sector. This research objective to examine the model of sustainable village empowerment in the perspective of feminism in Bandung Regency. A qualitative approach with a case study method in Bandung Regency was employed. Data collection involved in-depth interviews with relevant stakeholders, participatory observation, and analysis of documents related to village empowerment in tourism. Interpretative analysis was conducted with interactive procedures. The research findings indicate that the model of sustainable village empowerment from a feminist perspective involves several key elements. This entails support for the development of micro and small businesses owned by women, skills training, and access to fair capital and markets. Feminist perspectives significantly contribute to feminist thought, expanding the understanding of women's empowerment as a struggle for individual freedom and equality amidst the complexity of social, political, and cultural relationships in the empowerment of sustainable village tourism.



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2024 by author.

### PENDAHULUAN

Pariwisata telah berkembang lebih dari sekadar menjadi penggerak ekonomi (Song *et al.*, 2018), termasuk di Indonesia (Lemi *et al.*, 2019; Oktadiana, 2020). Pariwisata telah menjadi strategi untuk memperluas perannya sebagai alat pembangunan berkelanjutan, termasuk melalui konsep *Empowerment Based Tourism* (EBT) (Cole, 2011; Parl & Kim, 2015; Scheyvens & der Watt, 2021). Pemberdayaan masyarakat di destinasi pariwisata selaras dengan regulasi pariwisata budaya dan berwawasan ramah lingkungan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan (Sutawa, 2012). Pembangunan pariwisata tidak hanya penting sebagai katalis perekonomian tetapi juga sebagai strategi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan melalui konsep *Empowerment Based*

*Tourism* (EBT). Pariwisata sebagai salah satu sumber daya potensial untuk mendorong pengembangan ekonomi (Oknaryana et al, 2023)

EBT telah menjadi agenda penting, terutama di pedesaan, sebagai kunci pembangunan (Zhao *et al.*, 2022). Berbagai penelitian menekankan pentingnya pemberdayaan melalui pariwisata (Butler *et al.*, 2016; Burgos & Mertens, 2017; Dolezal & Novelli, 2020; Gohori & van der Merwe, 2021; Higgins-Desbiolles *et al.*, 2022; Joo *et al.*, 2019; Thananusak & Suriyankietkaew, 2023; Yue *et al.*, 2023; Banyak organisasi pariwisata di seluruh dunia mempromosikan 'orang-orang' dalam 'komunitas' sebagai 'pusat' atau 'jantung' pengembangan pariwisata (Rocharungsat, 2005). Keberlanjutan dalam pariwisata, sebagaimana ditegaskan Priatmoko *et al.*, (2021), mengandalkan kesadaran dan pemberdayaan kelompok, khususnya masyarakat pedesaan. Namun, sejauh mana penerapan "pemberdayaan perempuan" benar-benar berdampak positif terhadap kesetaraan gender dan emansipasi perempuan masih menjadi pertanyaan besar.

Penelitian sebelumnya telah membahas pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan desa wisata berkelanjutan (Irwan *et al.*, 2021; Khalid *et al.*, 2019; Mayaka *et al.*, 2017; Sutawa, 2012). Pemberdayaan bersifat multidimensi (Abou-Shouk *et al.*, 2021; Zhao *et al.*, 2023). Abou-Shouk *et al.*, (2021) dan Nguyen *et al.*, (2021) membahas dimensi pemberdayaan secara psikologis, sosial, dan ekonomi. Berbeda dengan Zhao *et al.*, (2023), yang mengkategorikannya secara individual dan komunal. Bentuk pemberdayaan meliputi bentuk psikologis, ekonomi, dan pengetahuan pada tingkat individu, sedangkan bentuk pemberdayaan meliputi bentuk sosial, politik, dan ekologi pada tingkat komunitas. McCall & Mearns (2017) menunjukkan dimensi ekonomi, sosial, psikologis, dan politik. Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah untuk memberdayakan individu dalam masyarakat sehingga mereka dapat berperan aktif dalam pengambilan keputusan, memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan.

Desa Parawisata berkelanjutan merupakan pendekatan pengembangan pariwisata yang mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi untuk mencapai keberlanjutan jangka panjang. Keberlanjutan merupakan agenda penting dalam perencanaan destinasi pariwisata (Westoby *et al.*, 2021; Pickel-Chevalier *et al.* (2019). Tujuan desa wisata berkelanjutan adalah menjaga keseimbangan antara pengembangan pariwisata yang bertanggung jawab dan pelestarian alam (Akbar *et al.*, 2019), budaya (Mayuzumi, 2021; Zhu *et al.*, 2017; Astawa *et al.*, 2017), dan kesejahteraan masyarakat lokal (Sutawa, 2012), mendorong pembangunan lokal (Epuran *et al.*, 2021; Schellhorn, 2007). Dalam praktiknya, desa wisata berkelanjutan melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengambilan keputusan terkait pengembangan pariwisata.. Pickel-Chevalier (2019) menjelaskan tujuannya sebagai keberlanjutan ekonomi, keberlanjutan sosial, dan pelestarian budaya di setiap desa. namun peran perempuan belum banyak dibahas. dalam model pemberdayaan di bidang pariwisata, seringkali terpinggirkan secara sosial dan politik (Seyfi *et al.*, 2020; Edwards, 2019). Proses pemberdayaan melalui pariwisata menghadapi berbagai hambatan internal (Park & Kim, 2016; Nguyen *et al.*, 2021), sementara kesetaraan gender dalam pariwisata masih belum jelas (Aghazamani *et al.*, 2021). Perempuan sebagai pengusaha dapat berkontribusi pada keberlanjutan ( Kirani & Santosa, (2023).

Permasalahan signifikan terkait pemberdayaan perempuan di bidang pariwisata antara lain yaitu bias jender serta pemberdayaan. Pemberdayaan dalam pariwisata menghadapi tantangan bias jender terkait peran perempuan, seperti pengasuhan anak, sementara laki-laki mendukung keuangan rumah tangga (McMillan *et al.*, 2011). Bias jender menyebabkan peran perempuan dalam kegiatan ekonomi terbatas (Bagheri *et al.*, 2022), sehingga menghambat partisipasi aktif dalam pengembangan dan pengelolaan desa wisata. Pendekatan inklusif dan kesadaran gender yang kuat diperlukan untuk memperluas peran perempuan dalam seluruh aspek kehidupan desa wisata, sebagai pemilik usaha, pengelola, dan pengambil keputusan. Mitra *et al.*, (2023) menyampaikan akar penyebab kesenjangan gender terkait dengan faktor sosial budaya. Thatcher (2011) menyatakan bahwa gender merupakan konstruksi sosial; itu adalah kategori yang digunakan manusia untuk membagi dan memahami dunia di sekitar mereka. Butler (1986) menjelaskan bahwa gender bukan hanya sekedar konstruksi budaya yang diterapkan pada identitas tetapi juga merupakan proses konstruksi identitas diri. Bagheri (2022) dan Bastian *et al.*, (2019) menyampaikan bahwa diskriminasi berbasis gender didefinisikan sebagai perlakuan negatif terhadap individu/kelompok berdasarkan gender, yang mengakibatkan ketidaksetaraan dan secara signifikan mempengaruhi peluang dan hasil pribadi dan kelompok.

Indonesia menempati peringkat ketujuh, di bawah Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Filipina, dengan Indeks Ketimpangan Gender (GII) sebesar 0,447 pada tahun 2023. Indeks ini mencerminkan kegagalan pencapaian pembangunan manusia. Ketidaksetaraan gender menyangkut kualitas hidup dan pemberdayaan di Indonesia (BPS, 2022). Kesenjangan peran perempuan dan laki-laki dalam pembangunan cukup signifikan. Terkait dengan rendahnya keterwakilan perempuan, Gerakan Gender dan Pembangunan menekankan pentingnya mencapai kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam semua aspek kehidupan, termasuk pariwisata. Meskipun perbedaan gender terdapat di banyak negara, perbedaan tersebut menjadi isu pembangunan yang spesifik di negara-negara berkembang (Vermiglio *et al.*, 2022).

Upaya mencapai kesetaraan gender seringkali dihadapkan pada sistem budaya patriarki yang lebih memberikan dominasi kepada laki-laki. Meskipun memiliki kemampuan yang tinggi, perempuan masih menghadapi hambatan dalam menjalankan perannya karena kondisi sosial dan budaya yang sudah ketinggalan zaman. Akibatnya, perempuan seringkali berada dalam bayang-bayang dominasi laki-laki dan terpaksa mengambil keputusan yang mengikuti kepentingan laki-laki. Budaya seperti ini menciptakan perbedaan peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan, sehingga berpotensi mengesampingkan peran perempuan dalam pengembangan desa pariwisata yang berkelanjutan. Beauvoir (1956) mengemukakan pentingnya kemandirian perempuan. Ia menjelaskan, setiap warga negara perempuan mempunyai hak untuk memilih, meskipun kebebasan ekonomi adalah kunci kebebasan perempuan. Beauvoir (1956) menggambarkan laki-laki sebagai "Diri", sedangkan perempuan dipandang sebagai "Yang Lain". Perempuan dianggap sebagai ancaman bagi laki-laki. Namun perempuan mempunyai hak untuk bangga dengan identitasnya sebagai perempuan. Feminisme eksistensial adalah cara berpikir dimana perempuan diperlakukan setara dengan laki-laki. Konsep ini diadopsi dari pemikiran Sartre

(1972) tentang kesadaran “etre”, “etr-en-soi”, dan “etre-pour-soi” (menjadi, menjadi, dan menjadi diri sendiri). Menurut Purnomo (2017), mengutip pendapat Sartre, seseorang bukanlah apa-apa sampai ia menjadi sesuatu melalui tindakan dan keberadaannya. Heriyanti *et al.*, (2020) menambahkan bahwa teori feminisme eksistensialis Simone de Beauvoir digunakan sebagai lensa untuk menganalisis bagaimana perempuan berusaha mendobrak batasan yang dibebankan pada perempuan dan menghindari dominasi laki-laki yang menindas, serta perjuangan perempuan melawan berbagai bentuk ketidakadilan.

Dalam menghadapi kendala struktural praktik budaya patriarki dalam praktik sosial di desa wisata, penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat lokal, kelompok perempuan, dan organisasi, termasuk melalui penelitian. Namun, peran dan emansipasi perempuan sering kali diabaikan, dan jarang ada penelitian yang membahas masalah ini.

Secara keseluruhan, meskipun beberapa literatur menunjukkan keberhasilan pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata, penelitian kualitatif yang mendalam diperlukan untuk menunjukkan kesenjangan berbasis gender yang menghambat keberhasilannya. Namun penelitian tentang gender dalam pariwisata masih langka (Je *et al.*, 2020; Kalisch & Cole, 2022). Selain itu, Pariwisata berbasis pemberdayaan tampaknya belum memberikan dampak signifikan terhadap pemberdayaan perempuan atau pencapaian emansipasi dari perspektif feminis. Pariwisata sebagai sebuah strategi untuk mencapai kesetaraan menghadapi perdebatan mengenai bagaimana pariwisata dapat berkontribusi terhadap ketidaksetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Operasionalisasi pariwisata sebagai strategi pembangunan melanggengkan ketergantungan dan kesenjangan (Higgins-Desbiolles *et al.*, 2021).

Studi ini berkontribusi terhadap pengembangan model pemberdayaan desa berkelanjutan yang inklusif dari perspektif feminis. Temuan penelitian diharapkan dapat memberikan landasan bagi pengambilan kebijakan dan praktik yang lebih efektif dalam meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan berkelanjutan desa wisata di Kabupaten Bandung. Ketidaksetaraan gender menghambat proses pembangunan, yang pada dasarnya merupakan komponen agenda politik untuk merancang kebijakan jangka panjang yang berpihak pada perempuan (Nassani *et al.*, 2018). Kalisch & Cole (2022) menegaskan bahwa struktur neoliberal, patriarki, kapitalis, saling terkait dan dianggap sebagai akar dari krisis global yang dihadapi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi model pemberdayaan desa wisata yang mempertimbangkan perspektif feminis untuk meningkatkan peran dan kontribusi perempuan dalam pengembangan desa wisata berkelanjutan.

## METODE PENELITIAN

Pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus di Kabupaten Bandung digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang pemberdayaan desa wisata. Peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan terkait, observasi partisipatif, dan analisis dokumen terkait pemberdayaan desa wisata. Wawancara mendalam dilakukan terhadap pemangku kepentingan seperti pengelola desa wisata Alam Endah (3 orang), masyarakat setempat (5), aparat pemerintah daerah yaitu sekertaris desa (1), dan tokoh terkait lainnya (1). Peneliti

menjelaskan tujuan penelitian kepada sumber data termasuk menjelaskan potensi risiko, dan manfaat penelitian. Nama partisipan atau pihak-pihak terkait harus dijaga kerahasiaannya. Inisial atau pseudonim dapat digunakan untuk menjaga anonimitas, seperti yang telah dilakukan dalam penelitian. Data hanya digunakan untuk penelitian ini.

Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang perspektif, pengalaman, dan peran mereka dalam pemberdayaan desa wisata. Observasi partisipatif dilakukan untuk mengamati secara langsung aktivitas dan dinamika desa wisata. Peneliti aktif terlibat dalam aktivitas masyarakat, mengamati interaksi, praktik, dan pola yang terjadi dalam konteks pemberdayaan desa wisata. Selain itu, analisis dokumen dilakukan untuk mengumpulkan informasi dari dokumen-dokumen relevan seperti rencana pembangunan desa, laporan kegiatan, dan dokumen kebijakan terkait pemberdayaan desa wisata. Dokumen-dokumen ini memberikan tambahan wawasan mengenai konteks dan upaya yang dilakukan dalam pemberdayaan desa wisata di Kabupaten Bandung.

Instrumen utama peneliti dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri sebagai alat pengumpulan dan analisis data. Peneliti secara aktif terlibat dalam interaksi dengan pemangku kepentingan, mengamati aktivitas di lapangan, dan menganalisis dokumen terkait. Analisis interpretatif dengan prosedur interaktif digunakan untuk menganalisis data dari wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Proses ini melibatkan identifikasi pola, tema, dan makna yang muncul dari data, serta terlibat dalam dialog dan interaksi dengan temuan-temuan tersebut. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami konteks yang lebih luas dan pentingnya pemberdayaan desa wisata di Kabupaten Bandung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Peran Perempuan dalam Program Desa Wisata Berkelanjutan**

Perempuan memiliki peran penting dalam mendorong berkembangnya desa wisata yang berkelanjutan dengan beragam keterbatasannya. Setelah melakukan wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan terkait, studi dokumen, dan observasi partisipatif di Desa Wisata Kabupaten Bandung, muncul berbagai temuan menarik terkait perancangan model desa wisata berkelanjutan dengan fokus pada pemberdayaan perempuan. Para pengelola desa wisata maupun aparat desa yang diwakili oleh sekretaris desa menyadari bahwa Pariwisata berfungsi sebagai alat untuk mengurangi kesenjangan ekonomi termasuk agar perempuan bisa lebih produktif. Para perempuan, di desa wisata memberikan peran lebih besar dalam pengembangan ekonomi lokal dan keputusan komunitas. Meskipun demikian, para perempuan dihadapkan pada ketidaksetaraan upah tugas yang lebih berat dengan peran ganda terjadi di awal pengembangan pariwisata. Perempuan memiliki beban kerja rumah tangga perempuan tidak berkurang meski mereka terlibat dalam sektor pariwisata.

### **Dampak Pemberdayaan Perempuan dalam Ekonomi**

Salah satu sumber data mengungkapkan bahwa para perempuan di Desa tersebut sangat gembira dengan kondisi desa saat ini. Terdapat berbagai kemajuan terutama dari sisi ekonomi. Meskipun para ibu rumah tangga tersebut dituntut melakukan pekerjaan rumah tangga dan menjamu tamu yang ada namun pekerjaan tersebut cukup memberikan manfaat ekonomi maupun sosial. Para perempuan di desa wisata tersebut menyediakan tempat tinggal dan menyediakan juga makanan untuk para tamu yang datang. Telah terjadi perubahan dalam cara perempuan di desa memahami pentingnya peran mereka, termasuk tanggung jawab mereka

dalam perekonomian keluarga. Beberapa bagian desa tertentu lebih bersih dengan sentuhan perempuan dan lebih ramah terhadap wisatawan, berbeda dengan sebelum desa wisata berdiri.

Seorang wanita paruh baya, ST menceritakan, Sebelumnya, tempat ini ramai pengunjung dari luar, apalagi di hari libur, namun para perempuan tersebut banyak berpartisipasi karena mempunyai pekerjaan membantu suami di sawah. Para pengelola wisata maupun aparat setempat terus memberikan edukasi dan berbagai pelatihan serta meningkatkan kesadaran tentang manfaat keterlibatan para ibu rumah tangga dalam kegiatan wisata tersebut. Banyak perempuan, baik pedagang tetap maupun kader desa, yang ikut serta. Desa juga memfasilitasi partisipasi perempuan. Meskipun ada beberapa yang mengalami kesulitan pada awal kegiatan, namun terdapat perubahan. Para ibu rumah tangga semakin mandiri secara ekonomi dan berani menyuarakan keinginannya terkait desa wisata. emansipasi perempuan tidak lepas dari rancangan model desa wisata berkelanjutan. Kesempatan cukup terbuka bagi para perempuan di Desa wisata untuk mengambil bagian dalam pengelolaan wisata meskipun terbatas pada tingkat operasional. Para ibu rumah tangga aktif dalam kegiatan di desa wisata dan turut serta dalam pengambilan keputusan seperti layanan wisata tambahan bagi para tamu, variasi hidangan kuliner untuk para tamu,. Para perempuan berperan aktif dalam melestarikan tarian, musik, dan tradisi lokal melalui pertunjukan atau festival budaya.

#### **Kesadaran Perempuan terhadap Existensi Diri**

Temuan pertama penelitian ini menekankan pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap peran perempuan dalam pengelolaan desa wisata. Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan desa wisata sangat menunjang keberhasilan pengembangan desa wisata menuju status mandiri atau berkelanjutan menunjukkan kesadaran pada eksistensinya. Temuan dilapangan menunjukkan pada beberapa kasus bahwa ada hambatan untuk mengikuti pelatihan keterampilan untuk mendukung program desa wisata. Hambatan tersebut seperti peran sebagai ibu yang tidak dapat ditinggalkan dan waktu pelatihan yang kurang sesuai dengan kondisi peserta. Para Perempuan tersebut memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan dan pengembangan desa wisata lebih banyak karena pengalaman mereka di rumah. Para Perempuan memiliki peluang lebih besar untuk berkontribusi dan mempengaruhi pengambilan keputusan yang berdampak pada keberlanjutan desa wisata. Akses terbuka pada pelatihan membuat para perempuan berani mengambil peran sebagai pemandu wisata, tidak hanya menyampaikan informasi serta berbagi cerita dan perspektif unik tentang budaya lokal. Para perempuan berani mendirikan dan mengelola usaha pariwisata seperti homestay, restoran, atau agen perjalanan, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan ekonomi lokal. Para perempuan menjadi mentor atau fasilitator bagi perempuan lain, membantu mereka mengembangkan potensi dan terlibat dalam kegiatan pariwisata.

#### **Hambatan Struktural dan Budaya dalam Pemberdayaan Perempuan**

Temuan kedua menyoroti pentingnya mengatasi hambatan struktural yang menghambat pemberdayaan perempuan. Akses perempuan terhadap sumber daya untuk mendukung berbagai program di desa wisata perlu diperluas dan didukung oleh pemerintah setempat. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan akses perempuan terhadap sumber daya penting seperti modal usaha, pelatihan keterampilan, dan jaringan pasar yang dapat mendukung

keterlibatan dalam kegiatan ekonomi berbasis pariwisata. Temuan menekankan bahwa dukungan dari pemerintah setempat sangat diperlukan untuk memperluas akses perempuan terhadap sumber daya.

Pemenuhan hak-hak perempuan, termasuk hak atas kesehatan, pendidikan, dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi gender perlu diperhatikan. Peran ganda perempuan dalam rumah tangga dan keterlibatan dalam pengembangan desa wisata meningkatkan beban baik secara fisik maupun psikologis. Kebijakan yang lebih inklusif dan berorientasi pada penghapusan hambatan struktural akan sangat membantu perempuan di desa wisata untuk memperoleh akses terhadap dukungan pemerintah. Pemerintah dapat memainkan peran penting dengan memberikan subsidi usaha, pelatihan profesional, dan memfasilitasi akses ke pasar yang lebih luas. Keterlibatan pemerintah desa dan lembaga terkait dalam mendukung kebijakan dan program desa wisata juga harus mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Hal ini diperlukan untuk menciptakan perubahan struktural yang diperlukan. Salah satu sumber data menyebutkan bahwa keterbatasan modal menjadi kendala utama, dan ada keterbatasan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan. Berbeda dengan wanita yang memiliki "kemandirian". Dukungan dalam pengembangan usaha mikro dan kecil milik perempuan, pelatihan keterampilan, dan akses terhadap pasar dan modal yang adil merupakan faktor penting dalam meningkatkan peran dan keberlanjutan ekonomi perempuan.

## PEMBAHASAN

Rancangan model desa wisata berkelanjutan tidak lepas dari upaya mencapai emansipasi perempuan. Hal ini sejalan dengan kerangka pariwisata yang dikembangkan sebagai alat kesetaraan, seperti yang dikemukakan oleh Je *et al* (2020), Kabil *et al* (2022), Mitra *et al* (2022), dan Vermiglio *et al* (2022). Keunggulan pariwisata adalah kemampuannya dalam mengurangi kesenjangan gender melalui pemberdayaan. Namun, di negara-negara berpendapatan rendah, ketidaksetaraan gender meningkat pada tahap awal pertumbuhan pariwisata. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya lapangan kerja terkait pariwisata bagi perempuan tanpa mengurangi beban kerja rumah tangga mereka. Perancangan desa wisata sebagai bagian dari proses pemberdayaan perempuan perlu memastikan bahwa perempuan mendapat dukungan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menyeimbangkan peran-peran tersebut. Selain itu, pariwisata juga berfungsi sebagai platform dalam upaya meningkatkan peran perempuan dalam perekonomian keluarga dan mengurangi kesenjangan gender.

Dalam perspektif feminis kritis, pemberdayaan masyarakat dalam konteks desa wisata perlu mempertimbangkan aspek kesetaraan gender dan mengatasi hambatan-hambatan yang menghambat peran perempuan. Sejalan dengan pandangan eksistensial (Simone de Beauvoir, 1956), pemberdayaan perempuan terletak pada kesadaran akan kebebasan diri dan kemampuan untuk mengatasi hambatan sosial, politik, dan ekonomi yang menghalangi perempuan untuk mewujudkan potensi mereka secara maksimal. Dalam konteks feminisme eksistensial, pemberdayaan perempuan terjadi melalui pengakuan terhadap posisi perempuan sebagai subjek yang mampu mengkonstruksi makna hidupnya sendiri melalui pengembangan desa wisata berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan Higgins-Desbiolles *et al* (2022), yang menekankan

pentingnya transisi dari model pembangunan yang bergantung pada bantuan eksternal ke model yang mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat lokal.

Perempuan berperan penting dalam pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata. Melalui peran ini, perempuan menunjukkan emansipasinya. Sejalan dengan Kirani & Santosa (2023) bahwa perempuan memainkan peran penting dalam membangun masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan dengan peran sebagai pengusaha. Emansipasi perempuan melalui desa wisata merupakan sebuah konsep menarik yang berpotensi mengatasi hambatan struktural dalam praktik budaya patriarki. Namun, struktur budaya patriarki yang kuat di masyarakat dapat menghambat peran perempuan dalam pemberdayaan desa wisata. Perempuan mempunyai kebebasan untuk memilih karir, mengambil peran dalam pengembangan pariwisata, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi komunitas dan lingkungan mereka. Pemberdayaan perempuan dalam konteks ini mencakup hak atas akses yang sama terhadap sumber daya, kesempatan pendidikan dan pelatihan, serta kebebasan menyuarakan pendapat dalam proses pengambilan keputusan.

Meningkatkan kesadaran gender di masyarakat dan melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan desa wisata sangatlah penting. Hal ini dapat dicapai melalui pelatihan, advokasi, dan pemberdayaan perempuan untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan dan pengembangan desa wisata. Hal ini akan memberikan peluang lebih besar bagi perempuan untuk berkontribusi dan mempengaruhi pengambilan keputusan yang berdampak pada keberlanjutan desa wisata. Mengatasi hambatan struktural menjadi agenda utama dalam desain model. Penting untuk mengatasi hambatan struktural yang menghambat pemberdayaan perempuan. Hal ini termasuk memastikan akses perempuan terhadap sumber daya seperti tanah, pendidikan, pelatihan, dan pendanaan. Selain itu, pemenuhan hak-hak perempuan, termasuk hak atas kesehatan, pendidikan, dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi gender, juga harus dipertimbangkan. Keterlibatan pemerintah daerah dan lembaga terkait dalam mendukung kebijakan dan program yang mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sangat penting dalam menciptakan perubahan struktural yang diperlukan. Pandangan patriarki yang menganggap perempuan sebagai "Lainnya" atau "objek" dalam relasi gender, membatasi kebebasan dan otonomi perempuan dalam pemberdayaan melalui desa wisata berkelanjutan. Perempuan mengambil peran sebagai subjek dalam kehidupan mereka sendiri, bukan objek yang ditentukan oleh norma dan harapan masyarakat. Mereka menyatakan bahwa perempuan harus melampaui peran yang telah ditentukan oleh masyarakat dan mencari kebebasan untuk mengembangkan potensi dan tujuan hidupnya.

Mendorong partisipasi aktif perempuan dalam kegiatan ekonomi di desa wisata sangatlah penting. Dukungan dalam pengembangan usaha mikro dan kecil milik perempuan, pelatihan keterampilan, dan akses terhadap pasar dan modal yang adil merupakan faktor penting dalam meningkatkan peran ekonomi perempuan. Hal ini akan memberikan peluang bagi perempuan untuk memiliki sumber pendapatan mandiri dan meningkatkan kemandirian ekonomi. Dalam mewujudkan desa wisata berkelanjutan, penting bagi perempuan untuk memiliki kebebasan menentukan jalannya sendiri tanpa dibatasi oleh stereotip atau peran gender yang sempit. Hal ini memberikan ruang bagi perempuan untuk mengembangkan potensinya,

berkontribusi dalam pembangunan masyarakat, dan mencapai kemandirian ekonomi. Pemberdayaan perempuan dalam konteks desa wisata berarti memberi mereka kebebasan untuk menjadi diri sendiri, mencapai tujuan hidupnya tanpa terkekang oleh harapan atau batasan masyarakat. Namun perlu dipahami bahwa pemberdayaan perempuan melalui desa wisata berkelanjutan bukanlah sebuah tujuan akhir melainkan sebuah proses yang berkesinambungan, dan perempuan terus berjuang mengatasi hambatan-hambatan yang menghambat kebebasan dan otonomi serta mengupayakan keberlanjutan berdasarkan potensi individu dan komunitas.

Konsep pariwisata berbasis pemberdayaan didasarkan pada tujuan keadilan dan penghapusan kesenjangan. Pembangunan desa fokus pada pemberdayaan kelompok perempuan berdasarkan paradigma emansipatoris. Selain itu, pendekatan pendidikan dan dialog kolektif diperlukan untuk membangun kesadaran dan memahami kondisi di mana proyek pembangunan desa wisata dipusatkan pada pemberdayaan perempuan. Model pemberdayaan perempuan di bidang pariwisata mengacu pada upaya mengatasi kesenjangan gender, mengatasi hambatan struktural, dan memberikan ruang bagi perempuan untuk mengembangkan potensinya secara maksimal. Model ini menekankan pentingnya kesetaraan gender di desa wisata berkelanjutan, dimana perempuan tidak hanya dipandang sebagai objek namun juga sebagai subjek yang mampu mengkonstruksi makna hidupnya sendiri. Melalui partisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi, pelatihan keterampilan, akses terhadap sumber daya, dan dukungan dalam pengembangan usaha mikro dan kecil, perempuan diharapkan mencapai kemandirian ekonomi dan berkontribusi terhadap pembangunan masyarakat secara keseluruhan.

## SIMPULAN

Perancangan model didasarkan pada identifikasi permasalahan terkait paradigma perempuan berperspektif gender dalam budaya patriarki. Model pemberdayaan perempuan di bidang pariwisata berfokus pada penghapusan kesenjangan gender dan mengatasi hambatan struktural, sekaligus memberikan ruang bagi perempuan untuk mengembangkan potensinya secara maksimal di desa wisata berkelanjutan. Melalui kesadaran gender, keterlibatan perempuan dalam pemberdayaan di desa wisata dapat memperluas ruang inklusif dan berkelanjutan. Perempuan mempunyai peran yang lebih aktif dan berkontribusi dalam pengembangan desa wisata serta meningkatkan kemandirian untuk mencapai keberlanjutan.

Implikasi teoritis: Konsep pemberdayaan berbasis pariwisata menekankan pentingnya mengurangi kesenjangan gender dalam konteks pariwisata. Mengintegrasikan teori Pariwisata Berbasis Pemberdayaan dengan teori feminis dapat memberikan landasan yang kuat bagi upaya pemberdayaan perempuan di industri pariwisata, dengan tetap mempertimbangkan aspek kesetaraan gender dan perubahan struktural yang diperlukan dalam masyarakat. Teori *Empowerment Based Tourism* (EBT), yang didukung oleh pandangan feminis, memberikan kerangka kerja yang relevan untuk memahami dan mengatasi tantangan yang dihadapi perempuan dalam konteks pembangunan pariwisata berkelanjutan. Melalui pendekatan inklusif dan kesadaran gender yang kuat, EBT dapat menjadi alat yang efektif dalam mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pengembangan desa wisata berkelanjutan.

Implikasi Praktis: Implikasinya adalah peningkatan kesadaran dan upaya nyata untuk memberdayakan perempuan di industri pariwisata secara ekonomi, sosial, dan politik dalam model pemberdayaan yang komprehensif. Pemerintah perlu mendorong pendekatan yang seimbang antara partisipasi dalam sumber daya pariwisata dan sektor ekonomi lainnya untuk mengurangi ketidaksetaraan gender dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, terutama di kalangan rumah tangga berpendapatan rendah yang dikepalai oleh perempuan. Perspektif feminis memperkuat argumen bahwa melalui penerapan teori pariwisata berbasis pemberdayaan, diharapkan terjadi peningkatan peran perempuan dalam kegiatan pariwisata, termasuk peningkatan pendapatan, akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta penguatan identitas budaya dan sosial.

Keterbatasan dan Saran Penelitian: Temuan penelitian memerlukan studi lebih lanjut untuk generalisasi. Studi kasus ini difokuskan di Kabupaten Bandung dan mungkin tidak mencerminkan pengalaman atau kondisi yang sama di wilayah lain. Pendekatan ini melibatkan interpretasi dan analisis yang dilakukan oleh peneliti, yang mungkin dipengaruhi oleh perspektif, keyakinan, dan pengalaman pribadi peneliti. Hal ini dapat mempengaruhi hasil penelitian dan interpretasi data. Keterbatasan ini mungkin membatasi generalisasi temuan dan pemahaman yang lebih luas mengenai pemberdayaan desa wisata. Diperlukan penelitian dengan pendekatan dan lokus penelitian yang berbeda. Je *et al* (2021) menegaskan bahwa ketidaksetaraan gender merupakan fenomena kompleks yang bervariasi antar negara. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami hubungan kompleks antara ketidaksetaraan gender dan pertumbuhan pariwisata dengan pendekatan yang mempertimbangkan heterogenitas spesifik suatu negara.

## REFERENSI

- Abou-Shouk, M. A., Mannaa, M. T., & Elbaz, A. M. (2021). Women's empowerment and tourism development: A cross-country study. *Tourism Management Perspectives*, 37(December 2020), 100782. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2020.100782>
- Aghazamani, Y., & Hunt, C. A. (2017). Empowerment in tourism: A review of peer-reviewed literature. *Tourism Review International*, 21(4), 333–346. <https://doi.org/10.3727/154427217X15094520591321>
- Aghazamani, Y., Kerstetter, D., & Allison, P. (2020). Women's perceptions of empowerment in Ramsar, a tourism destination in northern Iran. *Women's Studies International Forum*, 79(May 2019), 102340. <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2020.102340>
- Ahmadi Zeleti, F., Ojo, A., & Curry, E. (2016). Exploring the economic value of open government data. *Government Information Quarterly*, 33(3), 535–551. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.giq.2016.01.008>
- Akbar, I., Yang, Z., Han, F., & Kanat, G. (2020). The influence of negative political environment on sustainable tourism: A study of Aksu-Jabagly world heritage site, Kazakhstan. *Sustainability (Switzerland)*, 12(1). <https://doi.org/10.3390/SU12010143>
- Arroyo, Franklin Omar Zavaleta Pantaleón, A. J. C., Sánchez, Navarro-Mendoza, Y. P., & Esparza-Huamanchumo, R. M. (2023). Community Tourism Conditions and Sustainable Management of a Community Tourism Association: The Case of Cruz Pata, Peru. *Sustainability (Switzerland)*, 15(5). <https://doi.org/10.3390/su15054401>

- Astawa, I. P., Triyuni, N. N., & Santosa, I. D. M. C. (2018). Sustainable tourism and harmonious culture: A case study of cultic model at village tourism. *Journal of Physics: Conference Series*, 953(1). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/953/1/012057>
- Bagheri, F., Ghaderi, Z., Abdi, N., & Hall, C. M. (2022). Female entrepreneurship, creating shared value, and empowerment in tourism; the neutralizing effect of gender-based discrimination. *Current Issues in Tourism*, October, 1–18. <https://doi.org/10.1080/13683500.2022.2126749>
- Beauvoir (1956) *the second sex*. Translated and edited by h. M. Parshle. London Jonathan cape
- Burgos, A., & Mertens, F. (2017). Participatory management of community-based tourism: A network perspective. *Community Development*, 48(4), 546–565. <https://doi.org/10.1080/15575330.2017.1344996>
- Butler, G. (2017). Fostering community empowerment and capacity building through tourism: perspectives from Dullstroom, South Africa. *Journal of Tourism and Cultural Change*, 15(3), 199–212. <https://doi.org/10.1080/14766825.2015.1133631>
- Cavallaro, D. (2003) *French Feminist Theory. An Introduction*. Cambridge. Cambridge University Press
- Cole, S. (2006). Information and empowerment: The keys to achieving sustainable tourism. *Journal of sustainable tourism*, 14(6), 629–644.
- Dolezal, C., & Novelli, M. (2022). Power in community-based tourism: empowerment and partnership in Bali. *Journal of Sustainable Tourism*, 30(10), 2352–2370. <https://doi.org/10.1080/09669582.2020.1838527>
- Edwards, D. B. (2019). Shifting the perspective on community-based management of education: From systems theory to social capital and community empowerment. *International Journal of Educational Development*, 64(November 2018), 17–26. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2018.11.004>
- Elshaer, I., Moustafa, M., Sobaih, A. E., Aliedan, M., & Azazz, A. M. S. (2021). The impact of women's empowerment on sustainable tourism development: Mediating role of tourism involvement. *Tourism Management Perspectives*, 38(June 2020), 100815. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2021.100815>
- Elshaer, I., Moustafa, M., Sobaih, A. E., Aliedan, M., & Azazz, A. M. (2021). The impact of women's empowerment on sustainable tourism development: Mediating role of tourism involvement. *Tourism Management Perspectives*, 38, 100815.
- Epuran, G., Tescaşiu, B., Tecău, A. S., Ivasciuc, I. S., & Candrea, A. N. (2021). Permaculture and downshifting-sources of sustainable tourism development in rural areas. *Sustainability (Switzerland)*, 13(1), 1–19. <https://doi.org/10.3390/su13010230>
- Gohori, O., & van der Merwe, P. (2022). Tourism and Community Empowerment: The Perspectives of Local People in Manicaland Province, Zimbabwe. *Tourism Planning and Development*, 19(2), 81–99. <https://doi.org/10.1080/21568316.2021.1873838>
- Heriyanti, L., Sa'adah, N., & Andreyanto, N. (2020). Membaca Perempuan Di Titik Nol: Perspektif Feminisme Eksistensial. *Jurnal Wanita Dan Keluarga*, 1(2), 31–39. <https://doi.org/10.22146/jwk.1027>
- Irwan, Agustang, A., Adam, A., & Upe, A. (2021). Community Empowerment Strategy towards a Sustainable Rural Community-based Tourism Village. *Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI)*, 12(3), 2065–2076. [www.desabira.com](http://www.desabira.com)
- Joo, D., Woosnam, K. M., Strzelecka, M., & Boley, B. B. (2020). Knowledge, empowerment, and action: testing the empowerment theory in a tourism context. *Journal of Sustainable Tourism*, 28(1), 69–85. <https://doi.org/10.1080/09669582.2019.1675673>

- Kabeer, N. (2005). Gender equality and women's empowerment: A critical analysis of the third Millennium Development Goal. *Gender and Development*, 13(1), 13–24. <https://doi.org/10.1080/13552070512331332273>
- Kirani, C., & Santosa, S. (2023). Kontribusi Perempuan sebagai Pengusaha Fashion dalam Implementasi Sustainable Fashion untuk Membangun Lingkungan yang Berkelanjutan. *Jurnal Ecogen*, 6(4), 520-528.
- Khalid, S., Ahmad, M. S., Ramayah, T., Hwang, J., & Kim, I. (2019). Community empowerment and sustainable tourism development: The mediating role of community support for tourism. *Sustainability (Switzerland)*, 11(22). <https://doi.org/10.3390/su11226248>
- Khalid, S., Ahmad, M. S., Ramayah, T., Hwang, J., & Kim, I. (2019). Community empowerment and sustainable tourism development: The mediating role of community support for tourism. *Sustainability*, 11(22), 6248.
- Kunjuraman, V. (2022). Community-based ecotourism managing to fuel community empowerment? An evidence from Malaysian Borneo. *Tourism Recreation Research*, 47(4), 384–399. <https://doi.org/10.1080/02508281.2020.1841378>
- Lemy, D.M., Teguh, F. and Pramezwar, A. (2019), "Tourism Development in Indonesia", *Delivering Tourism Intelligence (Bridging Tourism Theory and Practice, Vol. 11)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 91-108. <https://doi.org/10.1108/S2042-144320190000011009>
- Mayaka, M., Croy, W. G., & Cox, J. W. (2018). Participation as motif in community-based tourism: a practice perspective. *Journal of Sustainable Tourism*, 26(3), 416–432. <https://doi.org/10.1080/09669582.2017.1359278>
- Mayuzumi, Y. (2022). Is meeting the needs of tourists through ethnic tourism sustainable? Focus on Bali, Indonesia. *Asia-Pacific Journal of Regional Science*, 6(1), 423–451. <https://doi.org/10.1007/s41685-021-00198-4>
- McCall, C. E., & Mearns, K. F. (2021). Empowering Women Through Community-Based Tourism in the Western Cape, South Africa. *Tourism Review International*, 45(2–3), 157–171. <https://doi.org/10.3727/154427221X16098837279967>
- McMillan, C. L., O'Gorman, K. D., & MacLaren, A. C. (2011). Commercial hospitality: A vehicle for the sustainable empowerment of Nepali women. *International Journal of Contemporary Hospitality Management*, 23(2), 189–208.
- Movono, A., & Dahles, H. (2017). Female empowerment and tourism: a focus on businesses in a Fijian village. *Asia Pacific Journal of Tourism Research*, 22(6), 681–692. <https://doi.org/10.1080/10941665.2017.1308397>
- Nassani, A. A., Aldakhil, A. M., Abro, M. M. Q., Islam, T., & Zaman, K. (2018). The impact of tourism and finance on women empowerment. *Journal of Policy Modeling*, 41(2), 234–254. <https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2018.12.001>
- Nguyen, D. T. N., d'Hauteserre, A. M., & Serrao-Neumann, S. (2022). Intrinsic barriers to and opportunities for community empowerment in community-based tourism development in Thai Nguyen province, Vietnam. *Journal of Sustainable Tourism*, 30(4), 723–741. <https://doi.org/10.1080/09669582.2021.1884689>
- Oktadiana, H. (2021). A portrait of Indonesian tourism: present and future. *The Hospitality and Tourism Industry in ASEAN and East Asian Destinations*, 255-272.
- Oknaryana, O., Kuniawati, T., Wulandari, D. P., & Marwan, M. (2023). Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif dengan Metode Triple Helix untuk Mendukung Program Revitalisasi Save Maninjau. *Jurnal Ecogen*, 6(4), 566-575.
- Pickel-Chevalier, S., Bendesa, I. K. G., & Darma Putra, I. N. (2021). The integrated touristic villages: an Indonesian model of sustainable tourism? *Tourism Geographies*, 23(3), 623–647. <https://doi.org/10.1080/14616688.2019.1600006>

- Priatmoko, S., Kabil, M., Purwoko, Y., & Dávid, L. D. (2021). Rethinking sustainable community-based tourism: A villager's point of view and case study in Pampang Village, Indonesia. *Sustainability (Switzerland)*, 13(6), 1–15. <https://doi.org/10.3390/su13063245>
- Purnomo, Mulyo Hadi. (2017). "Melawan Kekuasaan Laki-laki: Kajian Feminis Eksistensial "Perempuan di Titik Nol; Karya Nawal El Saadawi". Nusa: Jurnal Ilmu Bahasa dan Sastra, Vol 12 No 4, hlm. 316-327.
- Rocharungsat, P. (2005). *Community-based tourism: Perspectives and future possibilities* (Doctoral dissertation, James Cook University).
- Sartre, Jean-Paul. (1973). *Existentialism and Humanism*. London Eyre Methuen.
- Schellhorn, M. (2007). Rural tourism in the 'Third World': the dialectic of development: the case of Desa Senaru at Gunung Rinjani National Park in Lombok Island. <http://researcharchive.lincoln.ac.nz/handle/10182/441>
- Scheyvens, R., & van der Watt, H. (2021). Tourism, empowerment and sustainable development: A new framework for analysis. *Sustainability*, 13(22), 12606.
- Seyfi, S., Hall, C. M., & Vo-Thanh, T. (2020). The gendered effects of statecraft on women in tourism: Economic sanctions, women's disempowerment and sustainability? *Journal of Sustainable Tourism*, 30(7), 1736–1753. <https://doi.org/10.1080/09669582.2020.1850749>
- Song, H., Li, G., & Cao, Z. (2018). Tourism and economic Globalization: An emerging research agenda. *Journal of Travel Research*, 57(8), 999-1011
- Sutawa, G. K. (2012). Issues on Bali Tourism Development and Community Empowerment to Support Sustainable Tourism Development. *Procedia Economics and Finance*, 4(Icsmed), 413–422. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(12\)00356-5](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(12)00356-5)
- Thananusak, T., & Suriyankietkaew, S. (2023). Unpacking Key Sustainability Drivers for Sustainable Social Enterprises: A Community-Based Tourism Perspective. *Sustainability (Switzerland)*, 15(4). <https://doi.org/10.3390/su15043401>
- Westoby, R., Gardiner, S., Carter, R. W., & Scott, N. (2021). Sustainable livelihoods from tourism in the "10 New Balis" in Indonesia. *Asia Pacific Journal of Tourism Research*, 26(6), 702–716. <https://doi.org/10.1080/10941665.2021.1908386>
- Yue, X., Li, Y., & Zhou, L. (2023). The Impact of Empowerment Practice on the Rural Collective Economy: Empirical Evidence from Rural Communities in China. *Land*, 12(4). <https://doi.org/10.3390/land12040908>
- Zhao, Z., Wang, Y., Ou, Y., & Liu, L. (2022). Between Empowerment and Gentrification: A Case Study of Community-Based Tourist Program in Suichang County, China. *Sustainability (Switzerland)*, 14(9), 1–17. <https://doi.org/10.3390/su14095187>
- Zhu, H., Liu, J., Wei, Z., Li, W., & Wang, L. (2017). Residents' attitudes towards sustainable tourism development in a historical-cultural village: Influence of perceived impacts, sense of place and tourism development potential. *Sustainability (Switzerland)*, 9(1). <https://doi.org/10.3390/su9010061>